

DPRD Kota Bogor Dorong Anggaran untuk Insentif Nakes

BOGOR (IM)- Tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas merawat pasien Covid-19 di Kota Bogor belum mendapat dana insentif hingga saat ini. Untuk itu, DPRD Kota Bogor mendorong agar Pemkot Bogor berinisiatif memberikan dana insentif bagi para nakes.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan, landasan hukum untuk pemberian insentif ini tertuang di dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE-2/PPK/2021, dan juga Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa.

Atang mengatakan, ada beberapa pos anggaran yang bisa dialokasikan untuk digunakan sebagai pembayaran insentif bagi nakes. Di antaranya, pos anggaran PCR test senilai Rp 22 miliar dan pos anggaran vaksin senilai Rp 8,6 miliar. "Tidak akan memanfaatkan anggaran tersebut, bisa dialihkan untuk insentif nakes, melalui mekanisme pengeseran, atau mekanisme lain yang diperbolehkan, melalui perubahan anggaran," kata politikus PKS tersebut, kemarin.

Agar insentif ini tepat sasaran, Atang menekankan, saat ini, dewan meminta data total nakes yang ada di Kota Bogor

ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Nantinya, besaran insentif yang akan diberikan dirumuskan bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor. Supaya anggaran yang tersedia dan jumlah nakes yang ada sesuai.

"Karena mau bagaimana pandemi belum selesai, kemudian, nakes selain rumah sakit menjadi garda terdepan juga. Meskipun dalam artian kita siapkan insentif, belum tentu sepadan nilainya dengan pengorbanan, tetapi setidaknya menunjukkan adanya keberhormatan dan adanya apresiasi dari pemerintah," ujar Atang.

Wakil Walikota Bogor, Dedie Abdu Rachim merespon baik usulan DPRD Kota Bogor mengenai pembayaran insentif nakes. "Bisa aja kalau disetujui dan anggarannya cukup memang harus kita berikan," katanya.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno memerinci, nakes yang bertugas di khusus di puskesmas Kota Bogor saat ini ada 953 orang. Sebelumnya, Retno menyebutkan, tahun ini, Pemkot Bogor tidak menganggarkan insentif nakes melalui APBD Kota Bogor, dengan pertimbangan defisit anggaran.

"Kami belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes yang bertugas di puskesmas Kota Bogor ke pemerintah pusat karena untuk nakes yang bertugas di rumah sakit saja belum dibayarkan," kata Sri. ● **gio**

Razia Narapidana Lapas Cianjur, Petugas Temukan Belasan HP

CIANJUR (IM)- Belasan telepon genggam milik narapidana Lapas Kelas II B Cianjur, Jawa Barat berhasil disita petugas gabungan yang sedang melakukan razia. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pengendalian narkoba dari dalam lapas.

"Kami mengamankan 17 telepon genggam dan sejumlah peralatan lain yang terlarang di dalam lapas. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan," kata Kepala Lapas Kelas II B Cianjur, Heri Aris Susila, Jumat (9/4).

Ia menjelaskan, telepon genggam tersebut diselundupkan ke dalam lapas dengan berbagai cara mulai dari dilemparkan dari luar hingga dengan cara menyelundupkan ke dalam bawahan pembesuk, sehingga pihaknya akan lebih memperketat pemeriksaan barang bawahan pembesuk.

Pemeriksaan barang bawahan pihak keluarga warga binaan akan lebih diperketat mulai dari pintu masuk, sehingga tidak ada lagi celah untuk barang terlarang

termasuk narkoba, telepon genggam dan peralatan lainnya, dapat dengan mudah dimiliki penghuni lapas.

"Banyak kemungkinan masuknya barang terlarang di dalam lapas, kami terus berusaha agar tidak ada lagi telepon genggam di lingkungan lapas. Pembinaan terhadap petugas sipir lebih ditingkatkan dan pengetatan pemeriksaan pembesuk juga dilakukan, termasuk razia rutin," tuturnya.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BNNK dan Polres Cianjur, untuk memutus rantai pengendalian narkoba dari dalam lapas, sehingga razia mendadak ke masing-masing sel tahanan akan lebih digiatkan, termasuk pembinaan untuk warga binaan di dalam pondok pesantren yang ada di lingkungan lapas.

"Peredaran atau pengendalian narkoba dari dalam lapas akan terus ditekan, sehingga Lapas Cianjur harus bersih dari peredaran dan pengendalian narkoba," ujarnya. ● **pur**

IDN/ANTARA



KERAJINAN UMPAN PANCING IKAN

Perajin menunjukkan hasil pembuatan umpan pancing ikan tiruan (Lure) berbahan kayu di Workshop Gogori Fishing, Desa Kutagandok, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, Jumat (9/4). Perajin di workshop tersebut mampu membuat rata-rata 20 buah umpan pancing per bulan yang dipasarkan ke berbagai daerah di Tanah Air dan diekspor ke Malaysia, Prancis, dan Spanyol dengan harga jual Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per umpan tergantung tingkat kesulitan dan ukuran.

Mudik Dilarang, 5 Pintu Gerbang Utama Jawa Barat Ini Dijaga Ketat

BANDUNG (IM)- Mendaklanjuti kebijakan larangan mudik, Pemrov Jawa Barat bakal melakukan penjagaan ketat melalui penyekatan di lima pintu gerbang utama Provinsi Jabar.

Penjagaan di lima titik perbatasan tersebut bakal melibatkan sedikitnya 1.600 petugas yang bakal memantau sekaligus menghalau pemudik yang tak dapat menunjukkan dokumen perjalanan sesuai prosedur.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari menyatakan, penyekatan di lima titik perbatasan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran 2021.

Hery menyebutkan, kelima titik perbatasan yang bakal dijaga ketat itu, yakni Bogor, Bekasi, Cirebon, Banjar, dan Pangandaran. Selain di lima titik perbatasan tersebut, penyekatan juga dilakukan di wilayah perbatasan kabupaten/kota di Jabar. "Untuk penyekatan kalau provinsi kemungkinan di lima (titik), belum lagi di sub

kota dan kabupaten misalnya di polres masing-masing," ujar Hery, Jumat (9/4).

"Kalau untuk yang lima, kita ini ada di Pangandaran, Banjar, Cirebon, Bekasi baik tol maupun yang pantura. Kemudian ada juga di Kabupaten Bogor yang Puncak," lanjut dia.

Hery menyebutkan, sedikitnya 1.600 petugas bakal dilibatkan dalam penyekatan tersebut. Petugas, kata Hery, akan memeriksa dokumen perjalanan. Jika pengendara tak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya, maka akan diminta memutar balik. "Kalau tidak punya kepentingan yang dikecualikan, kemungkinan harus balik kanan karena tidak diperkenankan," katanya.

Diketahui, pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Aturan terkait larangan itu pun sudah diterbitkan. Aturan termaktub dalam Surat Keputusan Nomor PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PEMBAGIAN PAKET SEMBAKO GRATIS JELANG RAMADHAN

Warga antre mendapatkan paket sembako gratis di Desa Kaum, Karang Asem, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/4). Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Baznas membagikan 500 paket sembako kepada warga miskin yang terbagi di sejumlah desa jelang memasuki bulan Ramadhan.

Nasib DOB Bogor Barat di Tangan Pemerintah Pusat

Pemekaran Kabupaten Bogor mutlak dilakukan karena daerah tersebut menyandang status kabupaten terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus Januari 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,43 juta jiwa.

CIBINONG (IM)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menyerahkan draft pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan pemerintah pusat. Saat ini, Pemkab Bogor tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat untuk merealisasikan pemekaran wilayah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin menukutkan, DOB Bogor Barat saat ini sudah siap. Mu-lai segi administrasi, batas wilayah, aset, prasarana, dan anggaran, siap untuk menjadi kabupaten sendiri.

"DPRD Kabupaten Bogor menyetujui ketika ditetapkan sebagai calon persiapan DOB, anggaran operasional per tahun paling sedikit Rp 25 miliar. Sedangkan pengkajian aparat sipil negara (ASN) tetap masih di induk," kata Burhanuddin di Kabupaten Bogor, kemarin.

Burhanudin menjelaskan, penentuan ibu Bogor Barat kota DOB nantinya ditentukan sesuai titik orbitasi atau titik tengah. Namun, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, walaupun usulan DOB merupakan aspirasi masyarakat. "Bobotnya di pemerintah yang harus

punya kewenangan," ujarnya.

Dia menuturkan, rencana ibu kota Kabupaten Bogor Barat diusulkan oleh para tokoh masyarakat dari Kecamatan Cigudeg, Leuwiliang, dan Dramaga. Dilihat dari luas lahan dan segi lainnya, sebelumnya ibu kota Bogor Barat ditetapkan di Kecamatan Cigudeg. Namun, karena kondisi Cigudeg rawan longsor, muncul juga usulan agar ibu kota di Rumpin.

"Tapi pemda tidak sembarangan untuk menentukan titik ibu kota. Harus ada kajian dari akademisi untuk mengkaji titik mana saja yang layak diusulkan jadi ibu kota," kata Burhanudin.

Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin mengatakan, rencana matang yang dimiliki Pemkab Bogor masih belum bisa direalisasikan. Sebab, moratorium pemekaran wilayah masih belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang jelas pemerintah pusat sampai saat ini masih

moratorium. Kalau harus ada yang didahulukan untuk mekar ya Bogor Barat karena kesiapannya sudah semua, tinggal ketok palu saja," kata Ade.

Berdasarkan catatan milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, DOB Bogor Barat memiliki 14 kecamatan dan 163 desa dengan luas wilayah kurang lebih 1.100 kilometer persegi.

Jumlah penduduk di wilayah DOB Bogor Barat berdasarkan catatan sensus penduduk pada 2013 ada sebanyak 1,4 juta penduduk. Dengan produk domestik regional bruto (GRDP) Rp 1,03 miliar dengan sektor pendapatan dari hotel, restoran dan hiburan (38 persen), industri (17 persen), dan pertanian serta peternakan (17 persen).

Tak hanya itu, skema pusat pengembangan wilayah di DOB Bogor Barat sudah ditetapkan. Kecamatan Parung Panjang dan Cigudeg akan menjadi episentrum perkem-

bang DOB Bogor Barat. Dua wilayah tersebut bakal diarahkan untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan budaya, hingga pendidikan dan penelitian.

Hanya saja, Ade mengaku, belum mendapat keputusan resmi terkait wacana pemekaran DOB Bogor Selatan. Saat ini, Pemkab Bogor baru menerima pengajuan pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Kabupaten Bogor yang terdiri 40 kecamatan nantinya tinggal 19 kecamatan jika dua wilayah itu disetujui menjadi kabupaten mandiri.

Pemekaran Kabupaten Bogor mutlak dilakukan karena daerah tersebut menyandang status kabupaten terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus Januari 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5,43 juta jiwa. "Belum ada. Kalau soal usulan resmi pemekaran Bogor Selatan, kami belum terima berkas-berkasnya," kata Ade. ● **gio**

Menko Airlangga Resmikan Masjid Etnik Tiongkok Tine Tang di Bogor

BOGOR (IM)- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meresmikan Masjid Tine Tang di area Jalan Tol Lingkar Luar Bogor Ring Road, Bogor, Kamis (8/4) kemarin. Keberadaan masjid menjadi simbol kebersamaan.

Peresmian dihadiri Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Dirut PT Marga Sarana Jabar (MSJ), Dedi Krisnariawan Sunoto dan pihak lainnya.

Pembangunan Masjid Tine Tang diprakarsai pengurus PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Mohammad Jusuf Hamka, selaku ketua panitia pembangunan.

Sedangkan untuk nama Tine Tang sebagaimana diungkapkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terinspirasi dari nama kedua orang tuanya, Hartini dan Hartarto.

"Tine berasal dari Hartini, panggilan ibu saya dan Tang berasal dari panggilan nama kecil ayah saya, kata Hartarto.

Arsitektur masjid terlihat unik dan ikonik, lokasinya cukup strategis diakses menuju Jakarta," katanya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya saat sambutan menyatakan, keberadaan Masjid Tine Tang menjadi ikhtiar yang luar biasa dalam upaya menegakkan kebersamaan dalam keberagaman di wilayah Bogor.

Apalagi kata dia, Kota Bogor memiliki sejarah yang luar biasa tentang kebersamaan dalam keberagaman, namun akhir-akhir ini agak tercoreng dan tercedera dengan berbagai macam dinamika sosial politik, dikaitkan dengan intoleransi sebagai.

"Jadi perlu ikhtiar terus menerus untuk menguatkannya," tegasnya.

Di hadapan semua yang hadir, Bima Arya bercerita Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan sempat berbisik kepadanya, seharusnya masjid ini ada di "Chinatown" Suryakencana Kota Bogor.

"Kelihatannya masih ada alokasi hibah dan wakaf. Jadi, mudah-mudahan Pak Airlang-

ga bisa membantu mendirikan masjid seperti ini di Chinatown di Kota Bogor," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya menilai keberadaan akses tol Sentul memberikan kemudahan warga Kota Bogor dan mampu mengurangi kepadatan kendaraan dari Kabupaten Bogor yang melewati Kota Bogor menuju Jakarta.

Ketua panitia pembangunan sekaligus Pengurus PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Mohammad Jusuf Hamka menceritakan, arsitektur Masjid Tine Tang yang oriental menggambarkan keberagaman.

"Nama Tine Tang dalam bahasa Tionghoa, memiliki arti pintu Surga. Arsitekturnya menjadi keunikan dan menjadi salah satu destinasi wisata yang dimanfaatkan para pengunjung," katanya.

Dirut PT MSJ, Dedi Krisnariawan Sunoto berharap keberadaan masjid ini menjadi upaya dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan tol, mengingat keberadaan rest area yang ada cukup jauh. ● **pra**

Jeritan Sopir Bus di Tengah Larangan Mudik Lebaran

BANDUNG (IM)- Para pekerja industri transportasi kian terjepit, seiring dengan larangan beroperasi bagi moda transportasi selama masa mudik Idul Fitri 2021. Aturan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan itu berlaku pada 6 Mei-17 Mei 2021.

Anto (45), tampak gamang, ketika duduk di bagasi samping busnya. Sebab, kursi bus jurusan Bandung-Surabaya yang ia kemudikan belum terisi seorang penumpang pun. "Minim banget mas, selama pandemi ini minim sekali penumpang," ujar Anto saat ditemui di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jumat (9/4).

Selama sembilan tahun ia bergelut di industri transportasi, tahun-tahun ini merupakan yang berat yang pernah dihadapi. Di pikirannya, terbayang biaya sekolah anak-anaknya yang mesti tetap dibayar penuh walau dilakukan secara daring, tapi pemasukannya seret.

"Dampaknya hampir 100 persen mas, bisa bisa dapat penghasilan Rp 200 ribu misalnya, sekarang hanya Rp 75 ribu. Kalau gaji sopir kan tergantung premi dari penumpang, saya dapat Rp 21 ribu dari satu penumpang untuk perjalanan dua hari dua malam," katanya.

Penghasilan tersebut tak rutin ia dapatkan. Dia harus bergiliran dengan rekan sesama sopir di perusahaan PO-nya untuk mengemudikan bus tersebut. Ia berharap pemerintah bisa meninjau ulang larangan mudik tersebut. Ia mengusulkan agar para penumpang di terminal juga bisa diperiksa dengan menggunakan alat deteksi Covid-19 yang diklaim pemerintah belakangan.

"Harapan kita semua sih tidak ditutup ya, kiranya ada protokol kesehatan. Waktu PSBB dan New Normal diperbolehkan jalan, misal tempat duduk 40, hanya boleh diisi 20. Kalau ditutup semua, kaum-kaum kaya kita semua bakal repot banget," katanya.

Sementara itu, Kurdi (50), sopir bus Bhineka jurusan Bandung-Cirebon hanya bisa pasrah menerima keputusan dari pemerintah. Menurutnya, bekerja dengan penghasilan minim lebih baik daripada tak bekerja sama sekali.

"Pendapatan sudah pasti berkurang. Mulai tanggal enam (Mei) tidak bisa jalan sama sekali. Kita ikuti pemerintah sahlah apa adanya, habis bagaimana aturan pemerintah begitu, ya kita ikuti," ujarnya.

Kurdi mengatakan rata-rata penumpang bus AKDP yang ia kemudikan berkisar tujuh orang dan paling banyak 10 orang dari kapasitas 40 penumpang. "Seingnya tidak memenuhi target setoran, memang berkurang banyak saat korona. Seharusnya PP itu setoran Rp 650 ribu, dan kalau Jumat-Sabtu naik jadi Rp 800 ribu," ujarnya.

Untuk menutupi biaya sehari-hari, istrinya di rumah berjualan. "Bantuan tidak ada, tapi alhamdulillah di rumah istri bisa jualan, daripada kita jenuh di rumah," ujar pria yang telah bekerja sebagai sopir bus selama 28 tahun itu.

Organda Kecwa

DPD Organisasi Angkatan Darat (Organda) Jawa Barat mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang melarang total operasi moda transportasi pada 6-17 Mei 2021. Organda menilai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan itu tidak adil.

Tercatat ada 44.900 angkutan umum yang terdampak akibat kebijakan tersebut, rincinnya 11.400 Angkutan Kota Antar-Provinsi (AKAP), 9.500 Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan kota sebanyak 24.000 se Jawa Barat. Dari angka tersebut, Organda Jabar menyebut hanya 20 persen yang beroperasi di masa pandemi Covid-19 ini.

"DPD Organda Jabar sangat kecewa terhadap keputusan yang disampaikan pemerintah tersebut, karena sebetulnya saat ini kerumunan-kerumunan orang sudah banyak terjadi, seperti halnya di pabrik-pabrik sudah mulai buka, pasar kalau mau jujur orang sudah berdesak-desakan, beberapa tempat hiburan juga sudah dibuka yang sebetulnya tidak bisa kita awasi dengan maksimal," ujar Wakil Sekretaris DPD Organda Jabar Ifan Nur Mufidin, Jumat (9/4). ● **pur**



IDN/ANTARA

LAYANAN GENOSE C19 BANDARA NGURAH RAI

Calon penumpang meniupkan nafas ke dalam kantong untuk dites menggunakan alat GeNose C19 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (9/4). Bandara Ngurah Rai resmi membuka layanan GeNose C19 untuk memudahkan penumpang pesawat dalam melengkapi persyaratan penerbangan dengan tarif Rp40 ribu.